

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (1st ed.). ALFABETA Bandung.
- AG.Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2nd ed.). ALFABETA.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). CV Pustaka Setia.
- Batampos.co.id. (2021, August). Wali Kota Batam Minta 1 Juta Dosis Vaksin Covid 19. *Batampos.Co.Id*.
- Bramasta, D. B. (2021, July). UPDATE Corona 28 Juli: Indonesia Catat Penambahan Kasus Kematian Harian Tertinggi di Dunia. *Kompas.Com*.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (ed.); 1st ed.). Widya Karya Semarang.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah* (B. A. Saebani (ed.); 1st ed.). PUSTAKA SETIA BANDUNG.
- Kaputra, E. (2021, July). Capaian Vaksinasi Corona di Kepri Berikut Stok Vaksin, Batam Tersisa 7.494 Vial. *Tribun Batam.Id*.
- Kriswibowo, A., Prameswari, J. K. P., & Baskoro, A. G. (2021). Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 4(2), 326–344. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17912>
- Metasari, Y. N., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2021). Implementasi Kebijakan PERDA No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui Pelatihan dan Pembinaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang. *Jurnal Imiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 52–61.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: formulasi, implementasi & evaluasi kebijakan publik* (Anwar (ed.)). PT Leutika Nouvalitera.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (2021).

- Pramesti, R., Muhammad, A. S., Safitri, D. P., Raja, M., & Haji, A. (2019). Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang Implementation of Non-Cash Food Assistance Through Electronic Mutual Assistance in Tanjung Pinang City. *Spirit Publik*, 14(1), 81–93.
- R.Dye, T. (2012). *Understanding Public Policy* (S. Chaisson (ed.); 14th ed.). Pearson.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Rusmini (ed.); 1st ed.). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *JAP*, VII(108), 78–89.
- Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th ed.). ALFABETA.
- Sugiyono. (2013b). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA Bandung.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Batam.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus* (N. Studio (ed.); 2nd ed.). CV. Hikam Media Utama.
- T.A.P, R. M. A., Virdani, D., Kasih, K. D., & Arif, L. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 4(2), 501–510. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18061>
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina (eds.); 1st ed.). APII Bandung.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (F. Zuhendri (ed.); 1st ed.). ALFABETA.
- Wijaya, A. (2019). *Metode Penelitian Menggunakan Smart PLS 03* (1st ed.). Innosain.
- Winarno, B. (2016a). *Kebijakan Publik Era Globalisasi:Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Caps Publishing.

Winarno, B. (2016b). *Kebijakan Publik Era Globalisasi* (T. Admojo (ed.)). CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Jurnal :

Kriswibowo, A., Prameswari, J. K. P., & Baskoro, A. G. (2021). Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 4(2), 326–344. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17912>

Metasari, Y. N., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2021). Implementasi Kebijakan PERDA No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui Pelatihan dan Pembinaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang. *Jurnal Imiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 52–61.

Pramesti, R., Muhammad, A. S., Safitri, D. P., Raja, M., & Haji, A. (2019). Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang Implementation of Non-Cash Food Assistance Through Electronic Mutual Assistance in Tanjung Pinang City. *Spirit Publik*, 14(1), 81–93. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/34583>

Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *JAP*, VII(108), 78–89.

T.A.P, R. M. A., Virdani, D., Kasih, K. D., & Arif, L. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 4(2), 501–510. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18061>

Website :

Batampos.co.id. (2021, August 3). Wali Kota Batam Minta 1 Juta Dosis Vaksin Covid 19. *Batampos.Co.Id*. <https://batampos.co.id/2021/08/03/wali-kota-batam-minta-1-juta-dosis-vaksin-covid-19/>

Bramasta, D. B. (2021, July 28). UPDATE Corona 28 Juli: Indonesia Catat Penambahan Kasus Kematian Harian Tertinggi di Dunia. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/28/081500165/update-corona-28-juli--indonesia-catat-penambahan-kasus-kematian-harian?page=all>

Kaputra, E. (2021, July 25). Capaian Vaksinasi Corona di Kepri Berikut Stok Vaksin, Batam Tersisa 7.494 Vial. *Tribun Batam.Id*. <https://batam.tribunnews.com/2021/07/25/capaian-vaksinasi-corona-di-kepri-berikut-stok-vaksin-batam-tersisa-7494-vial>

Dokumen :

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HK.02.02/4/423/2021.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, (2020).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

